

# Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh Sebelum dan Saat Pandemi COVID-19

Muti Najla & Heru Fahlevi

Universitas Syiah Kuala, Jl. Teuku Nyak Arief No.441, Kopelma Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh 23111, Indonesia

## ARTICLE INFO

**Keywords:**  
financial performance,  
local government,  
COVID-19,  
financial efficiency,  
financial autonomy.

**Kata Kunci:**  
Kinerja keuangan,  
pemerintah daerah,  
COVID-19,  
efisiensi keuangan,  
kemandirian keuangan.

**Corresponding author:**  
Heru Fahlevi  
hfahlevi@usk.ac.id

Copyright © 2023 by Authors,  
Published by SAKI.  
This is an open access article  
under the CC BY-SA License



## ABSTRACT

*This study aimed to determine whether there were differences between the financial performance of local governments (districts/cities) in Aceh before and during the COVID-19 pandemic. Data was collected from financial reports and budgets of district and city governments in Aceh, Indonesia, in 2019 and 2020. This study found mixed findings using the Paired Sample T-test and Wilcoxon Signed Rank Test. The local government's financial independence and financial efficiency during the COVID-19 pandemic were higher than before the COVID-19 pandemic, while local tax contributions decreased following the COVID-19 pandemic. This study also found that local government financial activities, financial effectiveness, and government retribution contributions before and during the COVID-19 pandemic were statistically not different. This study suggests the need to improve local government's financial autonomy and sustainability as a transfer from the central government may decline significantly within a short period, for instance, during the financial crisis and pandemic.*

## SARI PATI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah Aceh sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Data dikumpulkan dari laporan keuangan pemerintah daerah dan anggaran belanja pemerintah daerah tahun 2019 dan 2020. Dengan menggunakan Paired Sample T-test and Wilcoxon Signed Rank Test, penelitian ini menemukan hasil yang berbeda-beda antara dimensi kinerja keuangan yang diuji. Kemandirian keuangan daerah, efisiensi keuangan daerah ketika pandemi COVID-19 lebih tinggi dibanding sebelum pandemi COVID-19, namun kinerja keuangan dalam bentuk kontribusi pajak daerah mengalami penurunan setelah pandemi COVID-19. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada saat sebelum dan ketika pandemi melanda untuk dimensi aktivitas keuangan daerah, efektivitas keuangan daerah, dan kontribusi retribusi daerah. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah daerah memperkuat kemandirian keuangannya karena transfer dari pemerintah pusat sifatnya dapat berubah dalam waktu yang relatif singkat, misalnya ketika terjadi krisis keuangan dan pandemi.

## PENDAHULUAN

Pandemi *Coronavirus Disease* (COVID-19) yang melanda dunia sejak akhir tahun 2019 telah berdampak besar tidak hanya terhadap kesehatan masyarakat, namun juga pada aspek kehidupan lainnya termasuk ekonomi, sosial, dan politik. Peningkatan kasus terkonfirmasi positif dan kematian memaksa pemerintah untuk memberlakukan pembatasan mobilitas dan pertemuan fisik masyarakat sehingga berdampak buruk kepada dunia usaha dan aktivitas perekonomian (Chaudhary et al., 2020).

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan paket kebijakan kesehatan masyarakat dan ekonomi guna meredam penyebaran kasus dan memastikan perekonomian Indonesia tetap berjalan. Setidaknya ada 9 aturan terkait penanggulangan COVID-19 yang dikeluarkan pada awal menyebarnya kasus COVID-19 di Indonesia (Fahlevi, 2020). Peraturan dan kebijakan tersebut termasuk pembentukan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 sampai dengan perubahan postur dan rincian APBN tahun 2020 guna mendanai program dan kegiatan penanggulangan bencana COVID-19 dan konsekuensi dari pembatasan sosial.

Penerapan peraturan dan kebijakan pemerintah pusat tersebut berdampak langsung kepada pemerintah daerah termasuk dalam hal penganggaran. Kebijakan anggaran daerah yang telah disepakati sebelumnya oleh kepala daerah dan DPRD yang telah ditetapkan dengan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengalami penyesuaian dan perubahan yang sangat signifikan (Abdullah, 2020). Konsekuensinya adalah pengalokasian sumberdaya juga tidak lagi berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) RPJMD dan (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) RKPD, tetapi berdasarkan kepentingan *refocusing* dan realokasi, yang sangat berbeda dengan prioritas pembangunan daerah.

Intervensi pemerintah pusat melalui *refocusing* prioritas anggaran sebagai penanganan pandemi COVID-19 dan realokasi anggaran belanja ke dalam program dan aktivitas yang terkait dengan penanggulangan pandemi COVID-19 telah dilakukan. Terdapat 3 sektor yang menjadi prioritas, yaitu kesehatan, perekonomian, dan jaring pengaman sosial (Abdullah et al., 2020). Pemerintah daerah merespon dengan melakukan *refocusing* dan relokasi belanja, akibatnya target kinerja keuangan yang sudah ditentukan dan kinerja pemerintah daerah secara keseluruhannya akan terdampak.

Penelitian terkait dengan dampak COVID-19 dan konsekuensi dari peraturan terkait penanggulangannya terhadap ekonom dan keuangan negara masih terbatas (Fahlevi et al., 2022), khususnya terhadap kinerja pemerintah daerah. Selama ini penelitian dampak COVID-19 lebih banyak dilakukan pada sektor swasta/ industri dan pasar saham dengan hasil yang berbeda-beda. Misalnya, Spelta & Pagnottoni (2021) menemukan bahwa pasar saham di negara barat tidak segera merespon pengumuman pandemik oleh World Health Organization (WHO). Chen & Yeh (2021) meneliti mengenai kinerja saham perusahaan di Amerika Serikat dan menemukan bahwa pandemi COVID-19 mengakibatkan penurunan harga saham, namun harga saham kembali naik setelah adanya intervensi dan kebijakan pemerintah. Di samping itu, beberapa penelitian sebelumnya menemukan hasil bahwa beberapa industri tertentu seperti turis dan pariwisata, kesehatan, makanan dan pertanian mengalami dampak yang berbeda-beda (Inegbedion, 2020; Yu et al., 2020; Zhang et al., 2020). Hal tersebut mengindikasikan bahwa efek pandemi COVID-19 terhadap kinerja perusahaan berbeda-beda yang mungkin dapat dikaitkan dengan ukuran perusahaan dan profitabilitas perusahaan sebelum pandemi melanda (Shen et al., 2020b; Kim et al., 2020).

Beberapa penelitian sebelumnya

mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah untuk membatasi mobilitas sosial berdampak buruk terhadap ekonomi nasional dan masyarakat. Misalnya, Coccia (2016) meneliti hubungan antara durasi *lockdown* dan kesehatan masyarakat dan ekonomi di 6 negara di Eropa. Penelitian tersebut menemukan hasil bahwa durasi pembatasan sosial tersebut berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sebaliknya, kebijakan pembatasan sosial di Vietnam justru berpengaruh positif terhadap industri di negara tersebut (Ahn & Gan, 2020). Hasil yang sama juga ditemukan oleh Roosdiana (2020). Penelitian di Indonesia tersebut tidak mendapatkan hasil adanya perbedaan signifikan rasio keuangan seperti rasio likuiditas perusahaan properti serta *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebelumnya dan setelah pengumuman nasional kasus pertama COVID-19.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus kepada kinerja pemerintah daerah di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan ketika pandemi COVID-19 melanda serta konsekuensi ekonomi yang ditimbulkan dan kebijakan pemerintah termasuk akibat dari terjadinya *refocusing* dan realokasi anggaran yang dijalankan pemerintah pusat. Pemerintah daerah sebagai aktor utama pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah diharapkan mampu bertahan sehingga tetap dapat melayani masyarakat dan mencapai target yang telah ditentukan ketika krisis terjadi (Siti & Achmad, 2012). Penelitian ini penting dilakukan karena kinerja keuangan pemerintah berdampak langsung terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat (Rozi & Novianty, 2020)

Penelitian ini dilakukan di pemerintah kota dan kabupaten di Aceh. Sebagai sebuah daerah yang memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap transfer dana dari pusat, pandemi COVID-19 bisa berdampak sangat buruk terhadap anggaran dan realisasinya di pemerintah daerah di wilayah Aceh.

Alasan tingginya tingkat ketergantungan tersebutlah yang menjadikan Aceh sebagai objek dari penelitian ini. Namun demikian, hipotesa tersebut bisa saja tidak benar mengingat penelitian sebelumnya yang menemukan hasil bahwa dampak pandemik COVID-19 berbeda-beda antara satu entitas dengan entitas lainnya (Fahlevi et al., 2022).

### **Kinerja Keuangan Daerah dan Analisis Rasio Keuangan**

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah hasil ataupun output atas aktivitas atau perencanaan yang hendak ataupun sudah tercapai satu kali periode atas pemanfaatan anggaran daerah dengan jumlah dan kualitas yang bisa diukur. Kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dari manfaat atau kewajiban yang sudah diberikan pada masyarakat (Sumarjo, 2010). Mahmudi (2010) menyatakan kinerja keuangan dicerminkan atas pelaporan keuangan neraca, laporan realisasi anggaran, dan laporan arus kas. Laporan keuangan perlu dianalisis guna dapat memberi gambaran kinerja keuangan. Umumnya ukuran kinerja keuangan pemerintah daerah bermanfaat guna mendapati tingkatan kesehatan struktur keuangan, serta tingkatan kemandirian daerah dengan mengamati kemampuan daerah didalam penggalan sumber pendapatan daerah dibandingkan atas kewajiban pemerintahan didalam pembiayaan perbelanjaan daerah (Cohen, et al., 2019). Untuk menganalisa kinerja pemerintah daerah didalam melaksanakan pengukuran ataupun pengelolaan keuangan daerah ialah dengan melaksanakan analisa rasio keuangan terhadap anggaran pemerintah dan laporan keuangan pemerintah (Christofzik, 2019).

Analisis keuangan terhadap keuangan pemerintah daerah yang sudah dilaksanakan dan ditetapkan merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya. Analisis rasio keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan membandingkan hasil yang

telah dicapai oleh satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi (Turley et al., 2015). Terdapat berbagai rasio yang bisa dikembangkan sesuai data keuangan yang sumbernya atas APBD diantaranya ialah rasio kemandirian, rasio efisiensi, aktivitas, efektivitas, rasio kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah.

Hasil analisis rasio keuangan tersebut kemudian dimanfaatkan untuk dasar: (1) Melakukan penilaian kemandirian keuangan daerah didalam pembiayaan keterseleenggaraan otonomi daerah; (2) Melaksanakan pengukuran efektivitas dan efisiensi didalam melaksanakan realisasi pendapatan daerah; (3) Melakukan pengukuran sejauh mana proses pemda didalam melakukan perbelanjaan pendapatan daerah; (4) Melaksanakan pengukuran kontribusi masing-masing sumber pendapatan didalam melakukan penghasilan pendapatan daerah; dan (5) Mengamati berkembangnya pendapatan dan pengeluaran dimana dilaksanakan selama periode waktu tertentu.

### **COVID-19 dan Dampaknya terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Banyaknya kerugian yang muncul akibat pandemi yang memberi dampak terhadap ekonomi Indonesia. Setelah terjadi kenaikan kasus yang melonjak dengan waktu begitu cepat, pemerintah melakukan pembuatan aturan didalam menyelesaikan COVID-19, dengan memberlakukan PSBB yang dicantumkan didalam PP No 21 Tahun 2020. Dengan terdapat PSBB itu, seluruh aktivitas yang umumnya dilaksanakan terpaksa diberhentikan. Social ataupun physical distancing memberi pengaruh didalam turunnya aktivitas perekonomian dengan keseluruhan (Iskandar et al., 2020). Aspek vital perekonomian yaitu *supply*, *demand* dan *supply-chain*. Jika aspek itu sudah terkendala maka mengakibatkan terjadinya krisis perekonomian di bermacam kalangan masyarakat Indonesia dengan merata. Masyarakat yang rentan terhadap perekonomian akibat dari pandemi

COVID-19 adalah masyarakat yang penghasilannya di dapatkan dari pendapatan sehari-hari (Iskandar et al., 2020).

Dampak lainnya bisa diamati pula didalam sektor pariwisata ialah hotel, restoran atau pengusaha retail. Hotel terjadi turunnya okupansi sampai 40%. Wisatawaan yang mulai sepi pula terdampak didalam rumah makan ataupun restoran area yang customer umumnya ialah wisatawan. Sektor pariwisata yang lemah pula terdampak didalam perindustrian retail. Daerah yang berdampak didalam sektor retail ialah Jakarta, Manado, Bali, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan Medan (Hanoatubun, 2020). Ditengah pandemi COVID 19, Bank Indonesia akan melaksanakan usaha mempertahankan perekonomian Indonesia yang sedang tidak stabil ini. Perekonomian Indonesia turun sampai 5% dengan munculnya pandemi yang suatu saat bisa jadi akan terjadi penurunan lagi apabila pandemi ini terus berlanjut.

Anggaran untuk bencana biasanya dialokasikan dalam rekening (akun) belanja tak terduga dalam APBD. Jumlahnya relatif sama dari tahun ke tahun dengan besaran realisasi yang sangat tergantung pada peristiwa atau kejadian yang dapat dikategorikan “tidak dapat diduga sebelumnya” selama tahun berkenaan. Artinya, anggaran belanja ini tidak hanya digunakan untuk menghadapi bencana, tetapi juga untuk aktivitas di luar bencana sepanjang sudah masuk ke dalam kategori mendesak dan darurat. Namun pada masa pandemi COVID-19, definisi tersebut mengalami perubahan. Hal ini disebabkan kondisi luar biasa terasa sudah biasa dan kegiatan yang akan dilaksanakan sudah dapat direncanakan, sehingga tidak dapat lagi dikategorikan sebagai keadaan darurat yang membutuhkan penanganan secara cepat.

Pemerintah pusat menerapkan kebijakan yang harus diikuti oleh pemerintah daerah (*top-down policy*), yang menyebabkan kebijakan anggaran daerah mengalami penyesuaian dan

perubahan sangat signifikan. Pengalokasian sumberdaya tidak lagi berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD dan RKPD, tetapi berdasarkan *refocusing* dan realokasi, yang sama sekali berbeda dengan prioritas pembangunan daerah. Penyesuaian anggaran tidak sama dengan perubahan anggaran (Abdullah, 2020). Penyesuaian dilakukan hanya untuk beberapa komponen belanja yang diperuntukan untuk menghadapi Pandemi COVID-19, tidak mencakup hal lain yang harus direvisi oleh karena perubahan atas asumsi yang dibuat sebelumnya dan kinerja anggaran selama tahun berjalan berdasarkan laporan realisasi semester pertama dan prognosis enam bulan ke depan. Dari sudut pandang politik anggaran, penyesuaian dilakukan secara internal oleh kepala daerah, sehingga tidak ada penyesuaian anggaran yang mengganggu kesepakatan politik yang telah ditetapkan dalam APBD yang ditetapkan dengan Perda sebelumnya melalui kesepakatan antara kepala daerah dan pimpinan DPRD. Penyesuaian anggaran lebih menekankan pada pergeseran anggaran (*virement*) dengan tujuan dan sasaran anggaran yang tidak mengalami perubahan signifikan (Forrester & Mullins, 1991; Anessi-Pessina, et al., 2012).

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini menguji hipotesis sebagai berikut:

H<sub>a1</sub> : Terdapat perbedaan signifikan antara kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 dalam kurun waktu tahun 2019-2020.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dengan memanfaatkan angka untuk menunjukkan karakteristik individu atau kelompok. Tujuan atas penelitian ini yaitu untuk menganalisa perbandingan kinerja keuangan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota di provinsi Aceh. Tingkatan intervensi didalam penelitian ini ialah intervensi minimum. Situasi

didalam studi disini ialah kondisi yang tidak teratur. Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di provinsi Aceh yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini. Horizon waktu merupakan cross sectional.

Jumlah populasi ialah pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Aceh yang terdiri atas 23 kabupaten/ kota. Penulis dalam penelitian ini tidak mengambil semua populasi dikarenakan satu Kabupaten/ Kota dari 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh belum tersedia datanya. Oleh karena itu sampel dalam penelitian ini adalah 22 kabupaten/ kota yang ada di provinsi Aceh. Realisasi APBD pemerintah kabupaten/kota menjadi dasar perhitungan kinerja keuangan teruntuk periode sebelum dan saat pandemi COVID-19. Data Realisasi APBD didapatkan melalui Badan Pengelola Keuangan Aceh (BPKA), periode yang digunakan sebagai pengamatan penelitian adalah periode sebelum pandemi COVID-19 (tahun 2019) dan selama pandemi (tahun 2020).

Jenis data dalam penelitian ini adalah sekunder. Data pada penelitian ini berasal dari Laporan Realisasi APBD seluruh Kabupaten/Kota di provinsi Aceh yang di dapatkan dari BPKA. Didalam penelitian ini, data penelitian asalnya dari laporan realisasi APBD pemerintah Kabupaten/Kota di provinsi Aceh periode 2019 sampai 2020.

Pada penelitian ini variabel yang digunakan yaitu kinerja keuangan dengan mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah. Rasio yang dimanfaatkan didalam penelitian ini yaitu Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Aktifitas Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Keuangan Daerah, Rasio Kontribusi Pajak Daerah, Rasio Kontribusi Retribusi Daerah. Tabel 1 menunjukkan operasionalisasi variabel secara detail. Metode analisis terdiri dari uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas. Pada pengujian hipotesis terdiri Uji Beda.

**Tabel 1 Operasionalisasi Variabel**

No	Indikator	Definisi	Pengukuran	Sumber
1	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (MAN)	Rasio yang menggambarkan kapasitas keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dari usahanya sendiri dibandingkan dengan total pendapatan yang didapatkan.	$\frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$	Candra et al. (2019)
2	Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (EFI)	Rasio yang membandingkan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah.	$\frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}}$	Candra et al. (2019)
3	Rasio Aktifitas Keuangan Daerah (AKTIF)	Rasio yang menggambarkan besaran alokasi anggaran belanja modal dibandingkan dengan total belanja daerah yang menunjukkan prioritas pengeluaran pemerintah daerah.	$\frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$	Candra et al. (2019)
4	Rasio Efektifitas Keuangan Daerah (EFEK)	Rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk merealisasikan atau mencapainya target penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang telah disepakati di anggaran	$\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$	Tumija & Sinta (2022)
5	Rasio Kontribusi Pajak Daerah (PAJAK)	Rasio yang menunjukkan peran dan kontribusi pajak daerah dalam Pendapatan Asli Daerah.	$\frac{\text{Jumlah Pajak Daerah}}{\text{Jumlah PAD}}$	Fathah (2017)
6	Rasio Kontribusi Retribusi Daerah (REF)	Rasio yang menunjukkan besaran atau proporsi retribusi daerah yang dikumpulkan dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah.	$\frac{\text{Jumlah retribusi Daerah}}{\text{Jumlah PAD}}$	Fathah (2017)

Analisis data dalam penelitian ini terbagi dalam tiga bagian. Bagian yang pertama, analisis statistik deskriptif dengan membandingkan nilai minimum, nilai maksimum, dan rata-rata dari sample untuk menggambarkan kemandirian keuangan daerah, efisiensi keuangan daerah, aktivitas keuangan daerah, efektivitas keuangan daerah, kontribusi pajak daerah dan kontribusi retribusi daerah sebelum dan saat pandemi COVID-19. Bagian kedua, pengujian normalitas data dengan memanfaatkan uji Kolmogorov-Smirnov agar mengetahui apakah data terdistribusi secara normal ataupun tidak. Terakhir pengujian hipotesis memanfaatkan *Paired Sample T-Test*

teruntuk data yang didistribusikan secara normal. Dalam hal ini, alternatif pengujian bagi data yang tidak terdistribusi secara normal, dilanjutkan melalui statistik non parametrik yang relevan dalam hal ini adalah uji *Wilcoxon Signed Ranks Test*. Perhitungan statistik untuk hasil pengujian penelitian ini dibantu dengan program IBM SPSS Statistics 21.

## HASIL DAN DISKUSI

### Hasil uji statistik deskriptif

Analisis pada Tabel 2 statistik deskriptif dilaksanakan dengan melakukan perbandingan nilai minimum, maksimum, dan rata rata dari

sampel untuk menggambarkan masing masing indikator kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan saat pandemi. Pada indikator kemandirian keuangan daerah, rata-rata yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten kota di provinsi Aceh sebelum pandemi sebesar 9,42%, yang berarti kemampuan pemerintahan daerah kabupaten/ kota didalam membiayai keter selenggaraan otonomi daerah tersebut sebesar 9,42% atau masih kurang mandiri dengan perubahan yang tidak signifikan Sedangkan rata-

rata kemandirian keuangan daerah pada saat pandemi COVID-19 sebesar 10,04%, yang berarti kemampuan pemerintahan daerah kabupaten/kota didalam membiayai keter selenggaraan otonomi daerah tersebut sebesar 10,03%. Rata-rata Kemandirian tertinggi dicatat oleh Kota Banda Aceh sebesar 19,34% (sebelum pandemi COVID-19) dan rata-rata kemandirian terendah dicatat oleh Kabupaten Aceh Singkil sebesar 5,04% (sebelum pandemi COVID-19).

**Tabel 2 Hasil Statistik Deskriptif**

<b>Indikator</b>	<b>N</b>	<b>Nilai terendah</b>	<b>Nilai tertinggi</b>	<b>Rata-rata</b>
<b>MAN 2019</b>	22	5,04	19,34	9,42
<b>MAN 2020</b>	22	5,42	18,09	10,04
<b>EFI 2019</b>	22	90,37	113,35	101,22
<b>EFI 2020</b>	22	66,67	107,04	90,19
<b>AKTIV 2019</b>	22	12,11	26,99	19,31
<b>AKTIV 2020</b>	22	10,88	28,08	19,13
<b>EFEK 2019</b>	22	62,82	121,54	91,57
<b>EFEK 2020</b>	22	66,03	149,43	99,88
<b>PAJAK 2019</b>	22	5,88	52,06	16,29
<b>PAJAK 2020</b>	22	5,48	60,63	14,88
<b>RET 2019</b>	22	1,20	59,55	11,59
<b>RET 2020</b>	2	0,45	67,21	11,89

Pada indikator efisiensi keuangan daerah, rata-rata yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh sebelum pandemi sebesar 101,22%, yang mengindikasikan besaran realisasi pengeluaran sedikit lebih besar daripada realisasi pendapatan. Sedangkan rata-rata efisiensi keuangan daerah saat pandemi COVID-19 sebesar 90,18%, yang berarti realisasi pengeluaran lebih kecil daripada realisasi pendapatan. Rata-rata efisiensi tertinggi dicatat oleh Kabupaten Pidie sebesar 113,35% (sebelum pandemi COVID-19) dan rata-rata efisiensi terendah dicatat oleh Kabupaten Aceh Utara sebesar 66,67% (saat pandemi COVID-19).

Pada indikator aktivitas keuangan daerah (keserasian belanja modal), rata-rata yang dimiliki

oleh pemerintah kabupaten kota di Provinsi Aceh sebelum pandemi sebesar 19,31%, yang berarti kemampuan pemerintahan daerah kabupaten/kota didalam membelanjakan pendapatan daerah (belanja modal) tersebut sebesar 19,31%. Sedangkan rata-rata aktivitas keuangan daerah (keserasian belanja modal) saat pandemi COVID-19 sebesar 19,31%, yang artinya kemampuan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota didalam membelanjakan pendapatan daerah (belanja modal) sebesar 19,31 pada saat pandemi melanda. Rata-rata aktivitas tertinggi dicatat oleh Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar 28,08% (saat pandemi COVID-19) dan rata-rata aktivitas terendah dicatat oleh Kabupaten Pidie sebesar 10,88% (saat pandemi COVID-19).

Pada indikator efektivitas keuangan daerah, rata-rata yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten kota provinsi Aceh sebelum pandemi sebesar 91,57%, yang artinya kemampuan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota didalam merealisasikan pendapatan daerah tersebut sebesar 91,57. Sedangkan rata-rata efektivitas keuangan daerah saat pandemi COVID-19 sebesar 99,88%, yang artinya kemampuan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota didalam merealisasikan pendapatan daerah tersebut sebesar 99,88%. Rata-rata efektivitas tertinggi dicatat oleh Simeulu sebesar 149,43% (saat pandemi COVID-19) dan rata-rata efektivitas terendah dicatat oleh kabupaten Nagan Raya sebesar 62,82% (sebelum pandemi COVID-19).

Pada indikator kontribusi pajak daerah rata-rata yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten/Kota di provinsi Aceh sebelum pandemi sebesar 16,29%, yang berarti kemampuan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota didalam bentuk kontribusi penerimaan komponen PAD dari pajak daerah sebesar 16,29%. Sedangkan rata-rata kontribusi pajak daerah saat pandemi COVID-19 sebesar 14,88%, yang berarti kemampuan pemerintah daerah kabupaten/ kota dalam bentuk kontribusi penerimaan komponen PAD dari pajak daerah sebesar 14,88%. Rata-rata kontribusi pajak daerah tertinggi dicatat oleh kabupaten Aceh Besar sebesar 60,63% (saat pandemi COVID-19) dan rata-rata kontribusi pajak daerah terendah dicatat oleh Kabupaten Simeulu sebesar 5,48% (saat pandemi COVID-19).

Pada indikator kontribusi retribusi daerah rata-rata yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten kota di provinsi Aceh sebelum pandemi sebesar 11,59%, yang berarti kemampuan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota didalam bentuk kontribusi penerimaan komponen dalam PAD dari retribusi

daerah pada sebesar 11,59%. Sedangkan rata-rata kontribusi retribusi daerah saat pandemi COVID-19 sebesar 11,89%, yang berarti kemampuan pemerintahan daerah kabupaten/ kota didalam bentuk kontribusi penerimaan komponen dalam PAD dari retribusi daerah pada sebesar 11,89%. Rata-rata kontribusi retribusi daerah tertinggi dicatat oleh Kabupaten Pidie Jaya sebesar 67,21% (saat pandemi COVID-19) dan rata-rata kontribusi retribusi daerah terendah dicatat oleh kabupaten Aceh Timur sebesar 0,45% (saat pandemi COVID-19).

### Hasil Uji Beda

Hipotesis alternatif ( $H_a$ ) adalah pernyataan bahwa rata-rata atas indikator kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh adalah berbeda sebelum dan saat pandemi COVID-19. Sebaliknya, hipotesis nol ( $H_0$ ) dinyatakan rata-rata atas indikator adalah sama. Kriteria menolak hipotesis berdasarkan didalam tingkat signifikan 0,05. Jika probabilitas variabel berada di bawah 0,05 maka  $H_0$  ditolak, hal itu sekaligus mendukung hipotesis alternatif atau bisa dikatakan terdapat perbedaan antara indikator kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/ kota di provinsi Aceh sebelum dan saat pandemi COVID-19. Sebaliknya, apabila probabilitas indikator berada diatas 0,05 maka  $H_0$  diterima sekaligus menolak hipotesis alternatifnya atau dapat dikatakan tolak ukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh sebelum dan saat pandemi COVID-19 memiliki rata-rata yang sama atau tidak terdapat perbedaan. Secara detail hasil uji hipotesis digambarkan pada Tabel 3.

**Table 3 Kesimpulan atas Uji Hipotesis**

No	Rasio Keuangan Daerah	Periode Penelitian	Nilai signifikansi	Keputusan	Kesimpulan
1.	Kemandirian Keuangan Daerah (MAN)	Sebelum-Sesudah	0,031	Signifikan	Terdapat perbedaan secara statistik antara kemandirian keuangan daerah sebelum dan saat pandemi COVID-19
2.	Efisiensi Keuangan Daerah (EFF)	Sebelum-Sesudah	0,000	Signifikan	Terdapat perbedaan secara statistik antara efisiensi keuangan daerah sebelum dan saat pandemi COVID-19
3.	Aktifitas Keuangan Daerah (AKTIF)	Sebelum-Sesudah	0,806	Tidak signifikan	Tidak terdapat perbedaan secara statistik antara aktivitas keuangan daerah sebelum dan saat pandemi COVID-19
4.	Efektivitas Keuangan Daerah (EFEK)	Sebelum-Sesudah	0,053	Tidak signifikan	Tidak terdapat perbedaan secara statistik antara efektivitas keuangan daerah sebelum dan saat pandemi COVID-19
5.	Kontribusi Pajak Daerah (PAJAK)	Sebelum-Sesudah	0,028	Signifikan	Terdapat perbedaan secara statistik antara kontribusi pajak daerah sebelum dan saat pandemi COVID-19
6.	Kontribusi Retribusi Daerah (RET)	Sebelum-Sesudah	0,426	Tidak signifikan	Tidak terdapat perbedaan secara statistik antara kontribusi retribusi daerah sebelum dan saat pandemi COVID-19

Uji *Wilcoxon signed rank test* juga menunjukkan perbedaan antara kinerja keuangan kabupaten/kota sebelum dan pada saat pandemi sebagai berikut:

**Tabel 4 Hasil Uji Signed Ranks**

No	Indikator	Positive ranks (Sebelum < Ketika Pandemi)	Ties (%) (Sebelum = Ketika Pandemi)	Negative ranks (Sebelum > Ketika Pandemi)
1	Kemandirian Keuangan Daerah (MAN)	18 (78 %)	0 (0 %)	5 (22 %)
2	Efisiensi Keuangan Daerah (EFF)	4 (17 %)	0 (0 %)	19 (83 %)
3	Aktifitas Keuangan Daerah (AKTIF)	12 (52 %)	0 (0 %)	11 (48 %)
4	Efektivitas Keuangan Daerah (EFEK)	15 (65 %)	0 (0 %)	8 (35 %)
5	Kontribusi Pajak Daerah (PAJAK)	6 (26 %)	0 (0 %)	17 (74 %)
6	Kontribusi Retribusi Daerah (RET)	9 (39 %)	0 (0 %)	14 (61 %)

Hasil uji *signed ranks* yang tersaji pada Tabel 4 menunjukkan perbedaan antara satu indikator keuangan dengan indikator keuangan lainnya. Misalnya, 18 kabupaten/ kota (78%) mengalami penurunan kemandirian keuangan daerah (MAN) di tahun 2020 (pada saat pandemi) dibandingkan sebelum pandemi (2019). Di sisi lain, efisiensi keuangan daerah (EFF) dari 19 kabupaten/ kota (83%) di Aceh mengalami peningkatan pasca pandemi. Temuan ini dapat dikaitkan dengan menurunnya aktivitas ekonomi yang mengakibatkan turunnya pendapatan asli daerah ditambah lagi dengan berkurangnya dana transfer.

Namun demikian, indikator PAJAK dan RET mengindikasikan penurunan PAD dengan tingkat kontribusi Pajak dan Restribusi yang konstan.

### Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah di wilayah Aceh sebelum dan saat pandemi COVID-19 berlangsung. Untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya, peneliti menganalisis menggunakan enam indikator kinerja. Indikator yang digunakan diantaranya rasio kemandirian keuangan daerah,

rasio efisiensi, rasio aktifitas, rasio efektifitas, rasio kontribusi pajak dan rasio kontribusi retribusi daerah.

Hasil *paired sample t-test* menyatakan bahwa terdapat perbedaan signifikan 3 rasio keuangan yang diuji yaitu kemandirian keuangan (MAN), efisiensi keuangan daerah (EFF), dan kontribusi pajak daerah (RET) sebelum dan pada saat pandemik. Sebaliknya 3 rasio keuangan lainnya yaitu aktivitas keuangan daerah (AKTIF), efektifitas keuangan daerah (EFEK), dan kontribusi retribusi daerah (RET) tidak berbeda secara signifikan sebelum dan saat pandemi COVID-19.

Lebih lanjut, nilai kemandirian keuangan daerah pada 22 kabupaten/kota di Provinsi Aceh sebelum pandemi COVID-19 (tahun 2019) sebesar 9,42%, sedangkan selama pandemi COVID-19 (tahun 2020) sebesar 10,03%. Meskipun rasio kemandirian keuangan daerah mengalami peningkatan dari tahun sebelum terjadinya pandemi COVID-19, berdasarkan kriterianya rasio kemandirian pemerintah Aceh untuk tahun 2019 sampai 2020, nilai tersebut masih termasuk kedalam kategori sangat rendah dan tergolong dalam pola hubungan intruktif. Dengan kata lain, peranan pemerintah pusat masih sangat dominan dibandingkan dengan pemerintah daerah.

Nilai efisiensi keuangan daerah didalam 22 kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang teramati didalam hasil penelitian statistik deskriptif, sebelum terjadinya pandemi COVID-19 (tahun 2019) diperoleh 101,22%. Sedangkan untuk periode saat pandemi (tahun 2020) diperoleh 90,18%. Berdasarkan kriteria efisiensi keuangan daerah presentasinya antara >90-100% yaitu masih kurang efisien, disebabkan besar pembiayaan yang dikeluarkan untuk melaksanakan target penerimaan pendapatan lebih besar apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan yang didapat.

Realisasi belanja daerah di Aceh menurun disebabkan karena adanya perubahan alokasi

anggaran atau *refocusing* yang diterapkan oleh pemerintah pusat melalui PERPU No 1 tahun 2020, menyebutkan bahwa perubahan alokasi antar program harus melalui perubahan peraturan kepala daerah mengenai penjabaran APBD sebelum di ikut sertakan pada Perda/Qanun perubahan APBD, hal tersebut menjadi salah satu rintangan dan hambatan dalam proses percepatan realisasi belanja daerah.

Tidak adanya perbedaan yang signifikan pada rasio aktivitas keuangan daerah meskipun terjadi penurunan rata-rata aktivitas pada saat sebelum dan selama terjadinya pandemi COVID-19. Tercatat sebelum pandemi rata-rata rasio aktivitas sebesar 19,31% sedangkan selama terjadinya pandemi COVID-19 rata-rata rasio aktivitas sebesar 19,13%. Hal tersebut terjadi karena dua tahun kebelakang prioritas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat Aceh adalah pembangunan yang memiliki fungsi sebagai layanan publik, baru kemudian prioritas selanjutnya adalah pembangunan dengan fungsi pendidikan. Pemerintah daerah melakukan penghematan pada anggaran yang bersumber dari belanja modal untuk kegiatan yang tidak prioritas seperti renovasi rumah dinas. Penghematan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah sudah menyesuaikan target output dengan anggaran setelah penghematan. Meskipun belanja modal terealisasi sangat rendah, karena kebanyakan dana di prioritaskan dalam penanganan pandemi COVID-19, namun pemerintah daerah tetap berusaha mengalokasikan dananya pada belanja modal secara optimal meskipun terjadinya realokasi belanja akibat pandemi COVID-19.

Tidak adanya perbedaan yang signifikan pada rasio efektifitas keuangan daerah meskipun terjadi peningkatan rata-rata efektifitas pada saat sebelum dan selama terjadinya pandemi COVID-19. Tercatat sebelum pandemi rata-rata rasio efektifitas sebesar 91,57% sedangkan selama terjadinya pandemi COVID-19 rata-rata rasio aktivitas sebesar 99,88%. Didapati peningkatan

pada rasio efektivitas disebabkan rata-rata realisasi PAD kabupaten kota di Provinsi Aceh mengalami peningkatan, perealisasi komponen pokok PAD tahun 2020 rata-rata penerimaan lebih atas 100% atas apa yang sudah tertargetkan. Berbeda dengan tahun sebelum pandemi, ialah 2019 yang rata-rata realisasi PAD kabupaten/kota dari yang sudah tertargetkan kurang atas 100%.

Selanjutnya, kontribusi pajak daerah mengalami perbedaan sebelum dan pada saat pandemi karena nilai kontribusi pajak daerah selama terjadinya pandemi lebih rendah dibandingkan sebelum terjadinya pandemi. Tercatat sebelum pandemi rata-rata rasio kontribusi pajak daerah sebesar 16,29% sedangkan selama terjadinya pandemi COVID-19 rata-rata rasio efisiensi sebesar 14,88%. Penurunan pajak di Provinsi Aceh mengalami penurunan signifikan pada persentase realisasi dan nominal kontribusi. Penurunan penerimaan pajak secara nominal disumbang oleh pajak dalam negeri maupun pajak perdagangan internasional. Penurunan realisasi pada pajak dalam negeri secara nominal disumbang oleh penurunan PPh non migas, sedangkan penurunan Bea keluar menekan pajak perdagangan internasional (Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, 2020).

Pandemi COVID-19 mengakibatkan turunnya tingkatan permintaan serta komoditas pokok ekspor Indonesia sehingga terjadi pelemahan sektor riil, selanjutnya berlanjut pada kenaikan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan turunnya daya beli masyarakat. Pandemi COVID-19 mengakibatkan perekonomian dalam kondisi tidak stabil, sehingga mempengaruhi beberapa aspek. Ketakutan masyarakat terhadap pandemi juga mempengaruhi aspek sosial dan psikologis masyarakat, hal ini memiliki pengaruh pada kesadaran dan kemauan masyarakat didalam pembayaran pajak daerah.

Tidak adanya perbedaan yang signifikan pada rasio kontribusi retribusi daerah meskipun terjadi peningkatan rata-rata retribusi daerah pada saat sebelum dan selama terjadinya pandemi COVID-

19. Tercatat sebelum pandemi rata-rata rasio efektivitas sebesar 11,59% sedangkan selama terjadinya pandemi COVID-19 rata-rata rasio aktivitas sebesar 11,89%. Walaupun pandemi COVID-19 sifatnya multidimensional yang menghambat stabilnya kondisi *social* politik dimana memiliki pengaruh terhadap turunnya penerimaan daerah atas retribusi, hanya saja pemerintahan daerah mampu melakukan pengoptimalan target penerimaan didalam bentuk retribusi daerah, bersamaan dengan layanan yang tersedia ataupun diberikan oleh pemerintah daerah seperti objek retribusi yang bermanfaat secara langsung bagi pribadi ataupun badan. Sehingga sadarnya masyarakat untuk melakukan pembayaran retribusi masih tetap ada walaupun terpengaruhi dengan kondisi pandemi COVID-19.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan dampak pandemi COVID-19 terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Aceh memberikan dampak yang bervariasi atau tidak seragam. Penelitian dampak COVID-19 terhadap pemerintah daerah masih terbatas. Hasil penelitian ini menunjukkan juga bahwa dampak COVID-19 terhadap kinerja keuangan berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maghfiroh (2021) yang menemukan perbedaan signifikan pada rasio likuiditas yang diprosikan oleh *Financing To Deposit Ratio/Loan-to-deposit ratio* (FDR/LDR), rasio rentabilitas yang diprosikan oleh *Non performing financing/ Non performing loan* (NPF/NPL) pada bank di Indonesia setelah pandemik. Sedangkan pada rasio *capital adequacy ratio* (CAR) tidaklah terdapat perbedaan signifikan pada saat sebelum dan selama COVID-19. Dapat diambil kesimpulan dari hasil penelitian bahwa terdapat dampak COVID-19 terhadap kinerja keuangan bank di Indonesia.

Penelitian ini juga mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahmawati et al. (2020) menunjukkan tidak adanya perbedaan rata-rata biaya operasional pendapatan operasional

(BOPO) bank syariah dan *Return on Asset* (ROA) bank syariah sebelumnya dan sesudah terjadinya pandemi COVID-19. Dapat diartikan bahwa pandemi COVID-19 belum memberikan pengaruh pada bank syariah jika dinilai dari rasio BOPO dan rasio ROA. Sedangkan rasio FDR memperlihatkan adanya perbedaan diantara kinerja keuangan bank syariah sebelum terjadinya pandemi COVID-19 dan selama terjadinya pandemi COVID-19. Adanya pandemi COVID-19 telah memberikan dampak dari segi rasio FDR terhadap bank syariah yang telah terdaftar di OJK.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Ihami & Thamrin (2021) yang menemukan bahwa dengan semua dampak pandemi COVID-19 terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia, menunjukkan hasil rasio CAR, ROA, NPF, dan FDR tidak signifikan menunjukkan adanya perbedaan kinerja keuangan sebelumnya dan selama terjadinya pandemi COVID-19. Sedangkan penelitian yang dilaksanakan oleh (Melania, 2021) menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio keuangan CAR, NPL/NPF, ROA, ROE, BOPO, LDR/FDR pada bank syariah dan bank konvensional selama pandemi COVID-19.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Shen et al. (2020a) yang hasil penelitian menemukan bahwa wabah COVID-19 berdampak negatif signifikan terhadap kinerja perusahaan China yang terdaftar dengan menurunkan skala investasi dan mengurangipendapatan total. Untuk industri yang terkena pandemi, seperti pariwisata, catering, dan transportasi, terjadi penurunan korporasi yang signifikan kinerja pada kuartal pertama tahun 2020. Pandemi berdampak negatif pada produksi, operasi, dan penjualan industri ini, yang pada akhirnya tercermin dalam tingkat pengembalian yang negatif.

#### **KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN KETERBATASAN**

Pandemi COVID-19 telah memaksa pemerintah

pusat dan daerah untuk mengubah alokasi anggaran yang telah disusun sebelumnya. Di samping itu, perubahan anggaran tersebut juga berpotensi mempengaruhi kinerja pemerintah daerah khususnya kinerja keuangan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kinerja keuangan pemerintah kota dan kabupaten di wilayah Aceh mengalami perubahan, namun perubahan tersebut tidak terlihat untuk semua dimensi kinerja keuangan. Di satu sisi, 3 rasio keuangan yang diuji yaitu kemandirian keuangan (MAN), efisiensi keuangan daerah (EFF), dan kontribusi pajak daerah (RET) secara statistik mengalami perubahan sebelum dan pada saat pandemik. Sebaliknya 3 rasio keuangan lainnya yaitu aktivitas keuangan daerah (AKTIF), efektivitas keuangan daerah (EFEK), dan kontribusi retribusi daerah (RET) tidak berbeda secara signifikan sebelum dan saat pandemi COVID-19.

Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan kemandirian keuangan daerah ditingkatkan oleh setiap pemerintah daerah. Hal tersebut penting ketika pemerintah pusat mengurangi transfer ke daerah pada saat keuangan negara mengalami krisis atau perubahan alokasi anggaran. Tanpa kemandirian keuangan yang mampuni pemerintah daerah tidak akan mampu menutupi pos-pos pengeluaran khususnya pengeluaran rutin sehingga akan mengganggu kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya sampel yang terbatas sehingga generalisasi yang dilakukan juga terbatas. Dari segi indikator kinerja, penelitian selanjutnya perlu menggunakan variabel non keuangan sebagai pelengkap analisis. Penelitian berbasis kualitatif dengan tujuan mendapatkan pengalaman yang lebih lengkap terkait dampak pandemi terhadap kinerja pemerintah daerah juga perlu dilakukan sehingga kebijakan yang lebih efektif dapat diformulasikan.

---

## REFERENSI

---

- Abdullah, S. (2020, 30 Agustus Minggu). Perubahan APBD di Masa Pandemi COVID-19. Retrieved Desember Senin, 2020, diakses dari dialeksis.com:<https://dialeksis.com/analisis/perubahan-apbd-di-masa-pandemicovid-19/>
- Chandra, D., Ratnawati, V., & Mutia, Y., (2019). Analisis Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Perbandingan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. *Jurnal Ekonomi*, 27 (2).
- Chaudhary, M.P.R., Sodani, & Das, S. (2020). Effect of COVID-19 on Economy in India: Some Reflections for Policy and Programme. *Journal of Health Management*, 22 (2). <https://doi.org/10.1177/0972063420935541>
- Christofzik, D. I. (2019), "Does accrual accounting alter fiscal policy decisions? - Evidence from Germany", *European Journal of Political Economy*, Vol. 60. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2019.07.003>
- Coccia, M. (2016). The relation between restriction policies against COVID-19, economic growth and mortality rate in society. *Journal of Economics Library*, 3 (1).
- Cohen, S., Bisogno, M., & Malkogianni, I. (2019). Earnings management in local governments: The role of political factors. *Journal of Applied Accounting Research*.
- Fahlevi, H. (2020). *Anggaran penanggulangan bencana di Indonesia: Praktik, Dinamika, dan Tantangan*. dalam Harnovinsah, Sopanah, & Sari dari *Bunga Rampai Akuntansi Publik: Isu Kontemporer Akuntansi Publik*, Unitomo Press: Surabaya.
- Fahlevi, H., Saevic, TR., Jalaluddin, J., & Djalil, MA. (2022). Do social restriction policies responding to COVID-19 pandemic associated with economic growth? *E3S Web of Conferences*.
- Fathah, R.N., (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal EBBANK*. 8 (1). 33 – 48
- Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid-19 terhadap Perkonomian Indonesia. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2(1), 146-153.
- Inegbedion, H. E. (2020). COVID-19 lockdown: implication for food security. *Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies*. <https://doi.org/10.1108/JADEE-06-2020-0130>
- Iskandar, A., Possumah, B. T., & Aqbar, K. (2020). Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam saat Pandemi COVID-19. *Jurnal Sosial & Budaya Syar'I FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 7(7), 625-638.
- Kim, J., Kim, J., Ki, S., & Rebecca, L. (2020). Effects of epidemic disease outbreaks on financial performance of restaurants: Event study method approach. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 43, 32-41. <https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2020.01.015>
- Maghfiroh, R. N. (2021). Analisis dampak COVID-19 terhadap kinerja keuangan bank di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Mahmudi. (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Melania, A. A. (2021). Analisis kinerja keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional dimasa pandemi Covid-19 (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Pemerintah Indonesia (2020). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Jakarta: Pemerintah Pusat

- Rahmawati, Y., Salim, M. A., & Priyono, A. A. (2021). Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Bank Syariah Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19 (Studi Pada Bank Syariah Yang Terdaftar Di OJK). *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*, 10(10).
- Roosdiana, R. (2021). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Kinerja Perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di BEI. *IKRA-ITH EKONOMIKA*, 4(2),
- Shen, H., Fu, M., Pan, H., Yu, Z., & Chen, Y. (2020). The Impact of the COVID-19 Pandemic on Firm Performance. *Emerging Markets Finance and Trade*, 56(10), 2213–2230. <https://doi.org/10.1080/1540496X.2020.1785863>
- Shen, H., Fu, M., Pan, H., Yu, Z., & Chen, Y. (2020). The impact of the COVID-19 pandemic on firm performance. *Emerging Markets Finance and Trade*, 56(10), 2213-2230.
- Siti, K., & Achmad, T., (2012). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Se-Jawa Tengah Sebelum dan Sesudah Krisis Ekonomi 2008 (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Spelta, A., & Pagnottoni, P. (2021). Mobility-based real-time economic monitoring amid the COVID-19 pandemic. *Scientific Reports*, 11(1), 13069. <https://doi.org/10.1038/s41598021-92134-x>
- Sumarjo, H. (2010). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
- Tumija & Sinta, G., (2022). Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap. *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)*. 9 (2). 61-78
- Turley, G., Robbins, G., and McNena, S. (2015), “A Framework to measure the financial performance of local governments”, *Local Government Studies*, Vol. 41 No. 3, pp. 401–420. <https://doi.org/10.1080/03003930.2014.991865>
- Yu, X., Liu, C., Wang, H., & Feil, J. H. (2020). The impact of COVID-19 on food prices in China: evidence of four major food products from Beijing, Shandong and Hubei Provinces. *China Agricultural Economic Review*. <https://doi.org/10.1108/CAER-04-2020-0054>
- Zhang, Y., Diao, X., Chen, K. Z., Robinson, S., & Fan, S. (2020). Impact of COVID-19 on China’s macroeconomy and agri-food system – an economy-wide multiplier model analysis. *China Agricultural Economic Review*. <https://doi.org/10.1108/CAER-04-2020-0063>